



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

jogja
istimewa

NOTA KEUANGAN
APBD TA. 2022



NOTA KEUANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOTA KEUANGAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Umum.....	1
1.1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.2 Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2022	3
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan	9
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan	9
1.4 Sistematika Penulisan Nota Keuangan	14
BAB II	16
KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH.....	16
2.1 Kondisi Umum Pendapatan Daerah	16
2.2 Permasalahan Utama Pendapatan Daerah.....	16
2.3 Estimasi Pendapatan Daerah.....	17
2.3.1 Pendapatan Asli Daerah.....	17
2.3.2 Pendapatan Transfer	19
2.3.3 Lain–Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	20
2.4 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah	21
BAB III	26
KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH.....	26
3.1 Kondisi Umum Belanja Daerah	26
3.1.1 Belanja Operasi	27
3.1.2 Belanja Modal.....	27
3.1.3 Belanja Tidak Terduga.....	28
3.1.4 Belanja Transfer	28
3.2 Permasalahan Utama Belanja Daerah	29
3.3 Kebijakan Umum Belanja Daerah	29
3.4 Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah.....	31

BAB IV	39
KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH	39
4.1 Kondisi Umum Pembiayaan	39
4.1.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	39
4.1.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	39
4.2 Permasalahan Utama Pembiayaan.....	40
4.3 Kebijakan Umum Pembiayaan	41
BAB V	42
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	42
BAB VI	113
PENUTUP	113

DAFTAR TABEL

Tabel 2 - 1 Rencana Pendapatan DIY Tahun Anggaran 2022	20
Tabel 3 - 1 Alokasi Belanja Daerah DIY Tahun Anggaran 2022.....	28
Tabel 3 - 2 Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah	32
Tabel 4 - 1 Alokasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022	40
Tabel 5 - 1 Indikator dan Target Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Umum

1.1.1 Latar Belakang

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 merupakan dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelenggarakan pembangunan selama satu Tahun Anggaran, yang disusun Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah Provinsi dengan Pemerintah dan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah antara lain diwujudkan dalam penyusunan KUA dan PPAS yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD) Tahun Anggaran 2022. KUA dan PPAS Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada RKPD DIY Tahun 2022 yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

KUA Tahun Anggaran 2022 merupakan kebijakan politik Pemerintah Daerah yang dirumuskan dengan maksud agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu secara komprehensif

mengakomodir dinamika pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah, sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan digunakan dalam menilai efektifitas pelaksanaannya selama kurun waktu satu tahun ke depan, juga memuat Kondisi Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Penyusunan RAPBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Strategi Pencapaiannya.

RKPD DIY Tahun 2022 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dalam periode RPJMD DIY Tahun 2017-2022, dengan mengusung Tema Pembangunan ***"Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta"***. Tema tersebut memberikan penekanan pada perlunya Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai subyek dari pembangunan, yang diharapkan akan selalu Unggul serta dalam kondisi sehat, terdidik, ber-kebudayaan dan baik secara ekonomi. Selain itu, perlu dilakukan juga penekanan pada pembangunan di sektor-sektor strategis, terutama pada sector jasa, pertanian, pariwisata dan industri kreatif serta berusaha untuk menjaga kualitas infrastruktur dasar yang ada, agar tetap dapat berfungsi dengan baik dan mantap. Penekanan pada pengembangan SDM dan pembangunan di sektor strategis tersebut diharapkan akan mempercepat pemulihan sosial ekonomi masyarakat DIY untuk terlepas dari tekanan dampak yang ditimbulkan karena adanya pandemi *Covid-19*.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 juga mempedomani Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan RKPD sejalan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD. Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022 mendasarkan pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta KUA dengan Nota Kesepakatan Nomor

1/KSP/IX/2021
45/K/DPRD/2021', serta PPAS dengan Nota Kesepakatan Nomor
2/KSP/IX/2021
46/K/DPRD/2021 tertanggal 1 September 2021.

Selanjutnya dokumen RKPD, KUA dan PPAS menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2022.

1.1.2 Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2022

Kondisi perekonomian DIY sebagaimana kondisi Indonesia maupun dunia diperkirakan mengalami kontraksi dan terjadinya beberapa penurunan kinerja ekonomi terkait dengan pandemi global *Covid-19*. Proyeksi kinerja perekonomian DIY tahun 2021 dan 2022 menggunakan asumsi:

1. Kriteria skenario kinerja ekonomi tahun 2021 dan 2022 didasarkan pada perkembangan proses mitigasi kondisi perekonomian dan perkembangan perekonomian global. Terkait dengan pandemi, tahun 2021 melakukan awal proses dinamika perekonomian setelah dilakukan vaksinasi *Covid-19* yang diharapkan memberikan ruang gerak yang lebih longgar dalam interaksi antar manusia dan mobilitas manusia lebih tinggi;
2. Dari sisi penawaran, sektor yang selama ini memiliki kontribusi signifikan dalam output daerah dan terdampak paling besar adalah konstruksi, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, penyediaan akomodasi dan makan minum dan transportasi dan pergudangan sebelum pandemi *Covid-19*. Ketika pandemi, beberapa sektor tersebut tumbuh melambat. Pada tahun 2021 dan 2022, sektor-sektor tersebut diharapkan akan mendominasi kontribusinya pada produk daerah kembali setelah upaya vaksinasi dan konsentrasi pada intervensi dampak pandemi lebih terencana dengan lebih baik. Di samping itu, anggaran pemerintah mulai bergeser dari upaya penyembuhan penderita dan pencegahan kesehatan kepada upaya *recovery* ekonomi;

3. Dari sisi permintaan, penurunan konsumsi rumah tangga dan ekspor yang terjadi di tahun 2020 karena melemahnya daya beli dan praktek *social/physical distancing* serta melemahnya daya beli internasional akan berangsur mengecil karena diharapkan pandemi *Covid-19* akan berkurang di tahun 2021 dan 2022.

Proyeksi kondisi ekonomi makro Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2022 dipengaruhi oleh pelaksanaan mitigasi dampak *Covid-19* terutama vaksinasi di tahun 2021 dan kondisi perekonomian nasional maupun global. Mitigasi pasca pandemi mendorong peningkatan konsumsi pemerintah dalam melanjutkan berbagai macam program dan kegiatan intervensi secara lebih terencana dengan baik. Konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat 2,0% untuk skenario pesimis dan 3,6% untuk skenario optimis. Daya beli masyarakat juga meningkat dengan perbaikan kondisi perekonomian yang mendorong pertumbuhan pengeluaran rumah tangga meningkat 5,1% untuk skenario pesimis dan 5,7% untuk skenario optimis. Perbaikan kondisi nasional dan internasional diperkirakan dapat meningkatkan kinerja yang signifikan pada sektor pariwisata dan perdagangan luar daerah maupun luar negeri. Pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum diperkirakan 6,5% untuk skenario pesimis dan 8,20% untuk skenario optimis. Sementara itu, pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor diperkirakan 4,3% untuk skenario pesimis dan 5,6% untuk skenario optimis. Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan 4,95% untuk skenario pesimis dan 6,90% untuk skenario optimis. Membaiknya kondisi sektor pariwisata dan perdagangan menyebabkan peningkatan kinerja sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 7,8% untuk skenario pesimis dan 8,60% untuk skenario optimis.

Tabel 1 - 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2021 dan 2022

Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Pesimis	Moderat	Pesimis	Optimis
Pertumbuhan Ekonomi	4,2	5,2	5,00	5,70

Sumber: KUA DIY TA 2022

2. Proyeksi Inflasi

Tingkat inflasi di DIY menunjukkan tren yang menurun selama empat tahun terakhir ini. Hal ini menunjukkan efektifitas kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam melakukan monitoring dan pengendalian harga barang-barang terutama barang kebutuhan masyarakat. Kinerja tersebut diperkirakan akan tetap dilaksanakan sejalan dengan masa pandemi dan pasca atau mitigasi pandemi *Covid-19*. Tabel 1.2 menunjukkan proyeksi inflasi DIY tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 1 - 2 Proyeksi Inflasi DIY Tahun 2021-2022 (persen)

Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Pesimis	Moderat	Pesimis	Optimis
Inflasi	3,2	3	2,67	2,45

Sumber: KUA DIY TA 2022

Pada tahun 2021 dan 2022, berkurangnya pengaruh pandemi berakibat pada meningkatnya daya beli masyarakat maupun kemampuan fiskal pemerintah yang mendorong kenaikan permintaan barang dan jasa. Sedangkan di sisi lain, penawaran pada beberapa komoditas berpotensi meningkat terutama disebabkan oleh sudah lancarnya mobilitas bahan baku dan meningkatnya kinerja sektor transportasi. Akumulasi dampak sisi permintaan dan penawaran dan efektifitas TPID masih mendorong tingkat inflasi DIY masih berkisar antara 3 sampai 3,2% di tahun 2021 dan antara 2,45 sampai 2,67%.

3. ICOR

Nilai ICOR DIY selama tahun 2021 dan 2022 cenderung senantiasa menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2020 sebelumnya yang telah mengindikasikan adanya kenaikan efisiensi proses produksi dengan ICOR di bawah 6,0 di tahun 2022 dengan proyeksi optimis 5,57. Peningkatan efisiensi proses produksi di DIY dipengaruhi antara lain oleh membaiknya kinerja sektor transportasi dengan lebih tersedianya suplai bahan baku.

Tabel 1 - 3 Proyeksi Nilai ICOR DIY Tahun 2021-2022 (persen)

Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Pesimis	Moderat	Pesimis	Optimis
Skenario				
ICOR	6,46	5,71	5,85	5,57

Sumber: KUA DIY TA 2022

4. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka mulai tahun 2021 diperkirakan mengalami penurunan secara gradual dari tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh membaiknya kinerja sektor yang selama ini banyak menyerap tenaga kerja akibat dampak epidemi *Covid-19*. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1 - 4 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka DIY Tahun 2021-2022 (persen)

Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Pesimis	Moderat	Pesimis	Optimis
Skenario				
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,8	4,18	3,5	3,23

Sumber: KUA DIY TA 2022

5. Proyeksi Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di tahun 2021 dan 2022 akan menurun dibandingkan kondisi di saat pandemi yang telah meningkat menjadi 12,8%. Penurunan tersebut didorong oleh kenaikan pendapatan per kapita masyarakat yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat serta menurunnya tingkat pengangguran. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan dapat menurun kembali sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian dengan meningkatnya penyerapan angkatan kerja terutama pada sektor-sektor yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja serta adanya peningkatan intervensi pemerintah untuk menangani dampak epidemi yang terutama ditujukan kepada warga miskin. Dengan mengasumsikan kontribusi kelompok masyarakat menengah ke bawah pada masa sebelum dan sesudah pandemi *Covid-19*, tingkat kemiskinan pasca pandemi di tahun 2022 sudah dapat mencapai tingkat yang telah dicapai di tahun 2019. Proyeksi persentase penduduk miskin DIY tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel 1.5.

Tabel 1 - 5 Proyeksi Persentase Penduduk Miskin DIY Tahun 2021-2022 (persen)

Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Pesimis	Moderat	Pesimis	Optimis
Kemiskinan	13,1	12,60	12,68	11,00

Sumber: KUA DIY TA 2022

6. Proyeksi Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan pendapatan masyarakat di DIY tahun 2021 dan 2022 diperkirakan menurun. Hal ini disebabkan mulai aktifnya kegiatan ekonomi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang bekerja sebagai buruh atau karyawan ataupun menjalankan usaha mikro dan kecil sejak akhir tahun 2019. Kelompok ini merupakan bagian dari separuh tenaga kerja yang bekerja sebagai buruh atau karyawan dan bagian dari sekitar 41,86% kelompok angkatan kerja yang mempunyai usaha sendiri. Mulai meningkatnya dinamika kinerja sektor yang secara signifikan terdampak epidemi *Covid-19* seperti industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum maupun perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan dampak pengganda bagi usaha kecil. Usaha mikro dan kecil pun sudah mendapatkan akses bahan baku secara lebih baik. Akhirnya tingkat pengangguran yang menurun ini akan meningkatkan daya beli masyarakat serta dan mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan. Proyeksi ketimpangan distribusi pendapatan yang ditunjukkan oleh indeks Gini dapat dilihat pada tabel 1.6.

Tabel 1 - 6 Proyeksi Indeks Gini DIY Tahun 2021-2022

Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Pesimis	Moderat	Pesimis	Optimis
Indeks Gini	0,454	0,445	0,4262	0,4235

Sumber: KUA DIY TA 2021

7. Proyeksi Ketimpangan Antar Wilayah

Berkurangnya dampak epidemi *Covid-19* akan mendorong pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di berbagai wilayah terutama di wilayah yang selama ini kinerja perekonomiannya tertinggal akan memperbaiki ketimpangan

wilayah. Berbagai pembangunan fisik di tahun 2021 dan 2022 seiring dengan alokasi anggaran infrastruktur yang meningkat diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi daerah tertinggal. Di sisi lain, keberadaan IKM didominasi di tiga wilayah tertinggal di DIY yang meliputi sekitar 68% dari total IKM. Membaiknya kinerja sektor industri pengolahan akan berdampak pada sebagian besar IKM yang notabene berdomisili di daerah yang selama ini masih tertinggal dan akan berkontribusi pada penurunan ketimpangan antar wilayah. Pada tahun 2021 dan 2022, seiring dengan perbaikan kinerja perekonomian DIY umumnya dan beberapa sektor yang terkait dengan entitas usaha di wilayah tertinggal maupun pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di wilayah tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat ketimpangan. Proyeksi Indeks Wiliamson dapat dilihat pada tabel 1.7.

Tabel 1 - 7 Proyeksi Indeks Wiliamson DIY Tahun 2021-2022

Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Pesimis	Moderat	Pesimis	Optimis
Skenario				
Indeks Wiliamson	0,4728	0,4668	0,4569	0,4575

Sumber: KUA DIY TA 2022

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 secara umum Nota Keuangan Rancangan APBD DIY Tahun Anggaran 2022 berisi tentang:

1. Rencana Anggaran Pendapatan Daerah;
2. Rencana Anggaran Belanja Daerah, dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah;
3. Rencana Anggaran Pembiayaan, diarahkan pada peningkatan manajemen pembiayaan daerah yang berorientasi kepada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan

Penyusunan Nota Keuangan bertujuan memberikan gambaran secara garis besar mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan masalah Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Selain itu, Nota Keuangan juga bertujuan memberikan arahan tentang beberapa hal yang menjadi dasar Kebijakan Umum dalam Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan

Landasan hukum dalam penyusunan Nota Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan

- Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
 31. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
 32. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9);
 33. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah

- Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5)
 35. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12);
 36. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
 37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 67);
 38. Nota kesepakatan bersama antara Pemerintah DIY dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Nomor $\frac{1/KSP/IX/2021}{45/K/DPRD/2021}$ tanggal 1 September Tahun 2021 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Tahun Anggaran 2022;
 39. Nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah DIY dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Nomor $\frac{2/KSP/IX/2021}{46/K/DPRD/2021}$ tanggal 1 September Tahun 2021 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD DIY Tahun Anggaran 2022.

1.4 Sistematika Penulisan Nota Keuangan

Nota Keuangan APBD DIY Tahun Anggaran 2022 ini disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Umum
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan
- 1.4 Sistematika Penulisan Nota Keuangan

BAB II KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

- 2.1 Kondisi Umum Pendapatan Daerah
- 2.2 Permasalahan Utama Pendapatan Daerah
- 2.3 Estimasi Pendapatan Daerah
- 2.4 Arah Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

BAB III KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

- 3.1 Kondisi Umum Belanja Daerah
- 3.2 Permasalahan Utama Belanja Daerah
- 3.3 Kebijakan Umum Belanja Daerah
- 3.4 Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah

BAB IV KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 4.1 Kondisi Umum Pembiayaan
- 4.2 Permasalahan Utama Pembiayaan
- 4.3 Kebijakan Umum Pembiayaan

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan kegiatan dalam APBD

BAB VI PENUTUP

BAB II

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 Kondisi Umum Pendapatan Daerah

Rencana Pendapatan Daerah yang akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok yakni: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Anggaran pendapatan daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2021. Pendapatan Asli Daerah secara umum mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, sedangkan di sisi lain pendapatan dari Pendapatan Transfer direncanakan mengalami penurunan karena belum disahkannya Peraturan Presiden RI tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 yang memuat rincian anggaran transfer ke daerah.

2.2 Permasalahan Utama Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan terdapat permasalahan utama yang dihadapi yaitu antara lain:

1. Optimalisasi aset Pemerintah Daerah belum dilakukan secara profesional yang berorientasi pada pasar, hal ini terjadi karena kebijakan yang ditempuh masih mengedepankan fungsi fasilitasi dan pelayanan;
2. Beberapa obyek pendapatan yang bersumber dari transfer pusat ke daerah, sering mengalami perubahan alokasi sehingga hak-hak yang harus diterima oleh pemerintah daerah menjadi terhambat (belum adanya kepastian informasi mengenai dana transfer);
3. Masih terbatasnya kemampuan sarana dan prasarana, penggunaan teknologi informasi serta jangkauan jaringan pelayanan bagi pengelolaan retribusi daerah;

2.3 Estimasi Pendapatan Daerah

Pada APBD Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Daerah DIY dianggarkan sebesar Rp5.727.769.666.875,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp5.817.091.560.258,00 sehingga mengalami penambahan sebesar Rp89.321.893.383,00 atau naik sebesar 1,56%. Pendapatan Daerah DIY tahun 2022 direncanakan berasal dari sumber-sumber berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.022.159.849.868,00
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp3.787.355.210.390,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp7.576.500.000,00

Uraian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

2.3.1 Pendapatan Asli Daerah

Pada Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp2.022.159.849.868,00, apabila dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2021 yang dianggarkan sebesar Rp1.849.837.899.685,00 mengalami penambahan sebesar Rp172.321.950.183,00 atau naik sebesar 9,32%. Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp1.672.730.084.548,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan menjadi sebesar Rp1.808.218.924.548,00 naik sebesar Rp135.488.840.000,00 atau naik 8,10%.

Jenis penerimaan Pajak Daerah terdiri dari:

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB pada APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp843.500.000.000,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp915.262.150.000,00, naik sebesar Rp71.762.150.000,00 atau naik 8,51%.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

BBNKB pada APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp372.543.000.000,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022

diproyeksikan sebesar Rp431.000.000.000,00, naik sebesar Rp58.457.000.000,00 atau naik 15,69%.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

PBBKB pada APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp223.000.000.000,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp228.150.000.000,00, naik sebesar Rp5.150.000.000,00 atau naik 2,31%.

d) Pajak Air Permukaan (PAP)

PAP pada APBD Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp1.084.310.000,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan menjadi sebesar Rp1.204.000.000,00, naik sebesar Rp119.690.000,00 atau naik 11,04%.

e) Pajak Rokok

Pajak Rokok pada APBD Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp232.602.774.548,00 dan diproyeksikan sama pada Tahun Anggaran 2022.

2) Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp30.776.089.575,00 sedangkan Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp32.932.438.475,00 naik sebesar Rp2.156.348.900,00 atau naik 7,01%. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum sebesar Rp11.896.228.000,00, Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp20.513.715.475,00 dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp522.495.000,00.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berasal dari PT. Asuransi Bangun Askrida, PT. Bank BPD, PT. Tarumartani, PT. Anindya Mitra Internasional, dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP). Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp86.558.389.843,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp104.889.783.509,00 naik sebesar Rp18.331.393.666,00 atau naik 21,18%.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pada APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp59.773.335.719,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp76.118.703.336,00 naik sebesar Rp16.345.367.617,00 atau naik 27,35%.

2.3.2 Pendapatan Transfer

Target penerimaan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.787.355.210.390,00, dengan rincian sebagai berikut:

a) Transfer Pemerintah Pusat, terdiri atas:

1) Dana Perimbangan, terdiri atas:

(a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH bersumber dari Pajak terdiri dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Pada APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp87.663.204.000,00 sedangkan Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp84.641.504.000,00 turun sebesar Rp3.021.700.000,00 atau turun 3,45%.

(b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.265.379.234.000,00 sedangkan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan Rp1.224.852.487.000,00 turun sebesar Rp40.526.747.000,00 atau turun 3,20%.

(c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

DAK Non Fisik pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp955.341.948.000,00 sedangkan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp946.172.207.000,00 turun sebesar Rp9.169.741.000,00 atau turun 0,96%.

2) Dana Insentif Daerah (DID)

Pada APBD Tahun Anggaran 2021 DID dianggarkan sebesar Rp77.593.507.000,00 sedangkan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan

sebesar Rp30.000.000.000,00, turun sebesar Rp47.593.507.000,00 atau turun 61,34%.

3) Dana Keistimewaan

Pada APBD Tahun Anggaran 2021 Dana Keistimewaan dianggarkan sebesar Rp1.320.000.000.000,00 sedangkan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.500.817.718.900,00, naik sebesar Rp180.817.718.900,00 atau naik 13.70%.

b) Transfer Antar Daerah

Berupa Bantuan Keuangan yang pada APBD Tahun Anggaran 2021 Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp780.019.190,00 sedangkan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp871.293.490,00 atau naik sebesar Rp91.274.300,00 atau naik 11,70%.

2.3.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp7.576.500.000,00 dan diproyeksikan sama pada Tahun Anggaran 2022.

Target Pendapatan Daerah DIY Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2 - 1 Rencana Pendapatan DIY Tahun Anggaran 2022

Kode	Jenis Pendapatan	Target (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	5.817.091.560.258,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.022.159.849.868,00
4.1.01	Pajak Daerah	1.808.218.924.548,00
4.1.02	Retribusi Daerah	32.932.438.475,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	104.889.783.509,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	76.118.703.336,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.787.355.210.390,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.786.483.916.900,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	871.293.490,00

4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.576.500.000,00
4.3.03	Pendapatan Hibah	7.576.500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	5.817.091.560.258,00

Sumber: KUA DIY TA 2022

2.4 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada kebijakan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer.

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY Tahun Anggaran 2022 adalah:

- a. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- b. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut pajak dan retribusi daerah;
- c. Penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar pajak dan retribusi daerah;
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- e. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui bank/lembaga keuangan;
- f. Meningkatkan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui *electronic commerce (e-commerce)*;
- g. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- h. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- i. Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga dalam penyediaan biaya pembangunan daerah;
- j. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:

- 1) Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
- 2) Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas *online* pembayaran pajak, *one-stop service*, samsat keliling, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
- 3) Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android melalui aplikasi *infopkbdiy* yang dapat diunduh melalui *playstore* dan informasi perpajakan melalui *website*;
- 4) Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
- 5) Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*;
- 6) Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak.

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Pendapatan Transfer adalah bentuk konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah, yang bertujuan untuk mengurangi keuangan horisontal antar daerah, kesenjangan vertikal antara pusat-daerah dan mengatasi persoalan pelayanan publik antar daerah, serta menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antar pemerintah daerah. Terdapat 2 (dua) macam pendapatan transfer, yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Keistimewaan.

Kebijakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhandaerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Terdapat dua jenis DBH, yakni DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). DBH

dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berdasarkan prinsip *by origin*, yaitu daerah penghasil mendapatkan bagian yang lebih besar; dan daerah lain dalam satu provinsi mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak tahun berjalan.

Arah kebijakan DBH Tahun Anggaran 2022 adalah:

- a. mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan DBH bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan;
- b. menggunakan minimal 50% DBH cukai hasil tembakau (CHT) untuk mendukung program JKN melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan; dan
- c. memperkuat implementasi penggunaan 25% DBH dan DAU (tidak termasuk DAU Tambahan) untuk belanja infrastruktur publik.

2) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Arah kebijakan DAU Tahun Anggaran 2022 adalah:

- a. Memprioritaskan alokasi dan pemanfaatan DAU untuk penanganan wabah Covid-19 pada aspek medis, pembiayaan jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan stimulus pada pemulihan (*recovery*) perekonomian pasca bencana dampak Covid-19 di daerah.
- b. Pengalokasian DAU untuk mempercepat penyediaan infrastruktur publik di daerah untuk pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik, konektivitas antar daerah, peningkatan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan dengan mengarahkan pengalokasian sekurang kurangnya 25% dari DTU (tidak termasuk DAU Tambahan) untuk membiayai belanja infrastruktur.
- c. Memperhitungkan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) serta formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dalam formulasi DAU.

3) Dana Transfer Khusus (DTK)

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik, yang merupakan urusan daerah. DTK dibagi menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonFisik. Arah kebijakan pengalokasian DTK Tahun Anggaran 2022 adalah:

- a. Memperkuat penanganan wabah Covid-19 pada aspek medis, pembiayaan jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan stimulus pada perekonomian pasca bencana di daerah.
- b. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat (skema reguler) yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan konektivitas.

4) Dana Insentif Daerah (DID)

DID merupakan bagian dari dana transfer ke daerah yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. DID digunakan untuk:

- a. bidang pendidikan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan;
- b. bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi *Covid-19*, sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan;
- c. penguatan perekonomian Daerah termasuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan/atau
- d. perlindungan sosial.

5) Dana Keistimewaan

Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY selain wewenang yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang. Arah kebijakan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2022 adalah:

- a. meningkatkan pemanfaatan dana untuk penguatan dan pemberdayaan rakyat berlandaskan budaya dan adat; penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; penguatan ketahanan sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah; dan peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja;
- b. memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan K/L dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana; serta
- c. mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja.

BAB III

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

3.1 Kondisi Umum Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Struktur belanja diuraikan atas:

- a. belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- b. belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- d. belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah. Berpedoman pada regulasi yang ada, belanja daerah bisa dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi daerah, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek. Sedangkan belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Rencana Belanja Daerah dalam RAPBD TA 2022 digunakan untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang ada di dalam program/kegiatan yang dijabarkan dalam urusan pemerintahan wajib dan

urusan pemerintahan pilihan di masing-masing SKPD sesuai prioritas pembangunan.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang direncanakan sebesar Rp6.216.376.935.705,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.091.572.432.696,00 terdapat penambahan sebesar Rp124.804.503.009,00 atau naik 2,05%. Belanja Daerah DIY Tahun Anggaran 2022 dialokasikan pada 4 (empat) kelompok Belanja Daerah sebagai berikut.

3.1.1 Belanja Operasi

Pada APBD Tahun Anggaran 2021 Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp4.006.005.048.373,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp4.196.861.155.392,00 sehingga mengalami penambahan sebesar Rp190.856.107.019,00 atau naik sebesar 4,76%. Belanja Operasi tersebut direncanakan untuk:

- 1) belanja pegawai direncanakan sebesar Rp1.807.159.761.611,00;
- 2) belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp1.359.818.878.621,00;
- 3) belanja subsidi direncanakan sebesar Rp78.451.861.160,00;
- 4) belanja hibah direncanakan sebesar Rp921.480.154.000,00; dan
- 5) belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp29.950.500.000,00.

3.1.2 Belanja Modal

Pada APBD Tahun Anggaran 2021 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp772.603.879.305,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp640.689.520.730,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp131.914.358.575,00 atau turun sebesar 17,07%. Belanja Modal tersebut direncanakan untuk:

- 1) belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp181.999.515.000,00;
- 2) belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp81.463.051.884,00;
- 3) belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp230.858.505.755,00;
- 4) belanja modal jalan. Jaringan. Dan irigasi direncanakan sebesar Rp143.067.827.000,00; dan
- 5) belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp3.300.621.091,00.

3.1.3 Belanja Tidak Terduga

Pada APBD Tahun Anggaran 2021 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp69.073.641.335,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp40.415.200.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp28.658.441.335,00 atau turun sebesar 41,49%.

3.1.4 Belanja Transfer

Pada APBD Tahun Anggaran 2021 Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp1.243.889.863.683,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp1.338.411.059.583,00 sehingga mengalami penambahan sebesar Rp94.521.195.900,00 atau naik sebesar 7,60%. Belanja Transfer tersebut direncanakan untuk:

- 1) belanja bagi hasil direncanakan sebesar Rp727.007.587.183,00; dan
- 2) belanja bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp611.403.472.400,00;

Tabel 3 - 1 Alokasi Belanja Daerah DIY Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)
5	Belanja	6.216.376.935.705,00
5.1	Belanja Operasi	4.196.861.155.392,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.807.159.761.611,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.359.818.878.621,00
5.1.04	Belanja Subsidi	78.451.861.160,00
5.1.05	Belanja Hibah	921.480.154.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	29.950.500.000,00
5.2	Belanja Modal	640.689.520.730,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	181.999.515.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.463.051.884,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	230.858.505.755,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	143.067.827.000,00

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.300.621.091,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	40.415.200.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	40.415.200.000,00
5.4	Belanja Transfer	1.338.411.059.583,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	727.007.587.183,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	611.403.472.400,00
	Jumlah Belanja	6.216.376.935.705,00

3.2 Permasalahan Utama Belanja Daerah

Permasalahan utama Belanja Daerah tahun 2022 dapat diinventarisasi sebagai berikut:

- a. Beragamnya penafsiran terhadap subyek dan obyek belanja sehingga terjadi tarik ulur kepentingan dalam prioritas belanja;
- b. Antisipasi yang kurang akurat terhadap permasalahan masyarakat sebagai akibat dari penafsiran kewenangan dan produk-produk hukum yang belum mantap;
- c. Tuntutan kesebandingan antara kebutuhan riil masyarakat dan kewenangan yang dilimpahkan dengan target yang dicapai oleh Kabupaten/Kota;
- d. Orientasi sebagian program dan kegiatan masih jangka pendek sehingga kurang memperhatikan keberlanjutan dan dampak yang dapat ditimbulkan;
- e. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD, antara SKPD dengan instansi sektoral maupun antara SKPD Provinsi dengan SKPD Kabupaten/Kota dikaitkan dengan kewenangan masing-masing.

3.3 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan bersifat mengikat dan wajib, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana,

peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, dan program/kegiatan prioritas yang mendukung fokus tematik, yaitu:

- 1) Mengatasi ketimpangan wilayah;
- 2) Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan; dan
- 3) Tindak Lanjut/Antisipasi Pembangunan Kesehatan dan Sosial Masyarakat Dampak Pandemi *Covid-19*.

Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Belanja daerah juga diarahkan pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik dan kebutuhan suatu wilayah, sehingga akan mempengaruhi tematik pembangunan masing-masing kabupaten/kota secara administratif.

Selain itu belanja daerah diutamakan untuk memenuhi *mandatory spending* yaitu belanja yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dana pendidikan minimal sebesar 20% dari APBD sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 171 ayat (2).

Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah atausesuai dengan ketentuan dari pemerintah.

Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari APBD, namun juga memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama

pemerintah dan swasta, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun Anggaran 2022 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

3.4 Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan adalah sebesar Rp6.390.052.492.705,00. Kemampuan pendanaan tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Kemampuan pendanaan tersebut juga digunakan untuk membiayai Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Semua komponen belanja tersebut digunakan untuk mendanai program/kegiatan/subkegiatan yang dijabarkan dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan Prioritas Pembangunan.

Sesuai dengan tema pembangunan DIY pada tahun 2022, yaitu **"Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta"**. Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut dan pencapaian visi jangka panjang dan jangka

menengah DIY serta sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional, maka prioritas pembangunan daerah DIY Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan SDM yang berkualitas (sehat, berpendidikan, dan mampu secara ekonomi);
- b. Peningkatan Infrastruktur layanan dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. Peningkatan sektor-sektor unggulan dan potensial;
- d. Mewujudkan Pembangunan yang merata, selaras dan lestari;
- e. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 - 2 Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Plafon (Rp)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.918.687.837.142,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	996.323.114.000,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	868.061.922.643,00
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.576.369.750,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	106.024.000,00
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	14.570.000,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	165.467.838.277,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	150.901.053.902,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	238.418.500,00
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.958.000,00
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	67.875.722.586,00
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	28.757.072.500,00
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.844.860.000,00
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	53.532.000.000,00
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.705.396.750,00
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	386.677.000,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Plafon (Rp)
	DRAINASE	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	37.054.517.550,00
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.958.033.050,00
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	821.034.000,00
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	258.408.596.000,00
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	299.700.000,00
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	23.339.513.600,00
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	86.994.500.000,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.370.769.336,00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.801.566.836,00
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	10.165.044.750,00
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	78.223.361.012,00
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.632.059.000,00
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	12.000.000,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	30.647.566.100,00
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.098.036.000,00
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3.068.542.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.071.332.994.561,00
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.607.738.055,00
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	200.940.000,00
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	10.770.736.400,00
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	914.795.000,00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	592.636.500,00
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.133.013.100,00
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.946.451.865,00
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.082.909.000,00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	841.809.000,00
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	593.333.000,00
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	178.601.000,00
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	359.685.000,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Plafon (Rp)
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.093.645.500,00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	93.142.000,00
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	139.577.250,00
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	34.400.000,00
2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	6.274.309.000,00
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50.947.979.085,00
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	136.600.000,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.939.842.740,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	797.317.000,00
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PLH)	325.609.000,00
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	412.714.000,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	11.098.470.863,00
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	18.752.000,00
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	150.181.000,00
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	102.971.000,00
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	206.948.000,00
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	65.329.000,00
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	238.900.000,00
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	293.270.000,00
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.341.803.476,00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	95.408.396.947,00
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	297.166.700,00
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.884.964.841,00
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.819.914.000,00
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	676.010.600,00
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.993.479.688,00
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	343.272.000,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Plafon (Rp)
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	21.700.000,00
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	99.952.000,00
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	793.255.000,00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.183.545.000,00
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.287.466.000,00
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.984.336.000,00
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	308.387.000,00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	299.726.000,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	541.765.000,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	122.287.000,00
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	246.133.500,00
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	5.078.589.500,00
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	26.200.173.000,00
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.000.000.000,00
2.20.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.692.691.183,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	390.387.350,00
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.111.880.000,00
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.535.111.368,00
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	664.555.318.000,00
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.951.276.050,00
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	8.241.923.000,00
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	1.280.368.000,00
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.049.111.000,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	192.575.454.646,00
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.710.643.278,00
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	372.629.900,00
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	167.928.000,00
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5.318.847.030,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Plafon (Rp)
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	170.034.800,00
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.700.226.000,00
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.108.235.725,00
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.868.819.000,00
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.976.859.750,00
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.730.691.000,00
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	59.269.064.801,00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	29.193.788.000,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.068.366.250,00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.207.762.000,00
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	60.000.000,00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.441.157.800,00
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	9.534.157.500,00
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	251.871.000,00
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	315.030.000,00
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	700.017.700,00
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	602.184.000,00
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	410.972.300,00
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	4.658.145.100,00
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	28.233.000,00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	82.887.000,00
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	307.230.000,00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	657.339.000,00
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.206.656.000,00
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.443.631.362,00
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4.381.331.600,00
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	180.116.750,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Plafon (Rp)
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	450.599.000,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	326.384.495.123,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100.023.951.219,00
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	431.962.000,00
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.271.204.000,00
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	49.105.110.000,00
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.845.249.150,00
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.314.347.000,00
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	321.708.000,00
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.181.101.000,00
4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	27.600.242.500,00
4.01.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY	9.265.781.000,00
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	65.196.178.004,00
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	65.827.661.250,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.659.029.312.494,00
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.640.543.524,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.427.844.750,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.700.112.500,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	167.236.315.382,00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.386.055.621.583,00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.812.797.500,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.138.309.400,00
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.784.656.245,00
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	12.878.616.500,00
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.042.615.095,00
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.594.245.000,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	264.281.000,00
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.781.099.015,00
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	672.255.000,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Plafon (Rp)
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	28.846.931.221,00
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.072.975.721,00
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.347.694.500,00
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	426.261.000,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	19.519.910.518,00
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.202.574.518,00
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	217.138.500,00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3.695.000.000,00
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	629.754.000,00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.549.674.500,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.225.769.000,00

BAB IV

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 Kondisi Umum Pembiayaan

Anggaran Pembiayaan pada dasarnya adalah transaksi keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup dan memanfaatkan selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Secara optimal Anggaran Pembiayaan belum dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari perencanaan strategis dan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan Anggaran Belanja. Anggaran Pembiayaan secara rinci direncanakan sebagai berikut, anggaran pembiayaan Tahun Anggaran 2021 murni sebesar Rp363.802.765.821,00 dan pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp399.285.375.447,00, yang terdiri dari:

4.1.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp486.302.765.821,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan menjadi sebesar Rp572.960.932.447,00 naik sebesar Rp86.658.166.626,00 atau naik 17,82%.

Penerimaan Pembiayaan tersebut berasal dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya direncanakan sebesar Rp562.960.932.447,00; dan
- b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00

4.1.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp122.500.000.000,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan menjadi sebesar Rp173.675.557.000,00 naik sebesar Rp61.175.557.000,00 atau naik 54,38%. Alokasi tersebut akan digunakan untuk pembiayaan Penyertaan Modal Daerah.

Tabel 4 - 1 Alokasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)
6.	Pembiayaan	399.285.375.447,00
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	572.960.932.447,00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	562.960.932.447,00
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	572.960.932.447,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	173.675.557.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	173.675.557.000,00
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	173.675.557.000,00
	Pembiayaan Neto	399.285.375.447,00

4.2 Permasalahan Utama Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2022, anggaran Pembiayaan lebih diarahkan pada pemanfaatan sisa perhitungan sebagai bagian pemenuhan kebutuhan belanja daerah. Permasalahan utama Pembiayaan Daerah tahun 2022 dapat diinventarisasi sebagai berikut:

1. Untuk menutup defisit, Pemda DIY hanya mengandalkan penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya, yang jika tidak cermat dalam penghitungannya akan mengakibatkan adanya kegiatan yang tidak bisa didanai.
2. Pada pengeluaran Pembiayaan, Pemda DIY masih berkewajiban memenuhi modal inti Bank BPD DIY sebesar Rp3.000.000.000.000,- yang harus terpenuhi pada 31 Desember 2024.

4.3 Kebijakan Umum Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan DIY menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir. Penganggaran SILPA untuk Tahun Anggaran 2022 telah mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2021.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada tahun 2022 pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMD diprioritaskan untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

Penyertaan modal daerah diberikan kepada PT. BPD DIY dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/Pojk.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum mengatur bahwa modal inti Bank Umum sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) pada akhir Desember tahun 2024. Penambahan setoran modal pada PT. Bank BPD DIY didasarkan atas Perda DIY Nomor 14 Tahun 2018.

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Target dan sasaran program dan kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5 - 1 Indikator dan Target Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu dalam menyusun dan menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dalam 1 tahun kerja	100%
			1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun kerja	100%
			1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian pengelolaan administrasi barang milik daerah dalam 1 tahun kerja	100%
			1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah dalam 1 tahun kerja	100%
			1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pengelolaan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun kerja	100%
			1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketepatan waktu dan pemanfaatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun kerja	100%
			1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam 1 tahun kerja	100%
			1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketepatan waktu dan pemanfaatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun kerja	100%
				Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik dan sesuai dalam 1 tahun kerja	100%

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
				Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik dan sesuai dalam 1 tahun kerja	100%
			1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah seluruh layanan yang disediakan oleh BLUD DIY	19 layanan
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Prosentase sekolah (SMA, SMK & SLB) yang Akreditasi A	99,74%	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	capaian APM SMA Capaian APM SMA	39.94 % 39.94 %
			1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Capaian APM SMK	46.98 %
			1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Capaian APK SLB	84.38 %
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK	95%	1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah platform yang dapat digunakan untuk menyusun, menyajikan dan mengunduh kurikulum muatan lokal	7 outlet
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah dan khusus	87.68 %	1.01.04.1.01 Pemindehan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Persentase	100%
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase sekolah (SMA, SMK & SLB) yang Akreditasi A	99,74%	1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan (program keahlian, pendirian, dan penutupan)	15 perizinan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	trcapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinkes DIY	100%
			1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penanganan Pasien RSP Respira	16290 pasien
				Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN / Naban	1 Tahun
				Tercapainya administrasi Keuangan Dinkes DIY	100%

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
				Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan
				Terselenggaranya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun
			1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penanganan pasien RSP Respira	16290 pasien
				Tercapainya pengamanan barang milik daerah	100%
				Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah	1 Tahun
				Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 Persen
			1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
			1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum perkantoran Dinkes DIY	100%
				Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun
				Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen
			1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen
				Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Kantor	1 Tahun
			1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100%
				Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan
				Terselenggaranya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun
			1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100%
				Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun
				Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan Pelatihan dan Non Pelatihan yang Dilaksanakan	32 Kegiatan
				Penanganan pasien RSP Respira	16290 pasien
				Pengembangan Pelayanan Laboratorium	5 Persen
				Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa dan napza	1 Tahun
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	62,84%	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah alat kesehatan, obat, vaksin yang didistribusikan dan sarana distribusi makanan minuman yang di bina sesuai kebutuhan	5 kab/kota
				Penanganan pasien RSP Respira	16290 pasien
				Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa dan napza	1 Tahun
			1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Pengembangan Laboratorium Untuk Mendukung Program, Rujukan dan Kebutuhan Masyarakat	15 Layanan
				Penanganan pasien RSP Respira	16290 pasien
				Tercapainya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100%
				Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa dan napza	1 tahun
			1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan	100%
			1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Mendapatkan Pembinaan Mutu	100%

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Persentase Mantan Linatih yang Meningkatkan Kompetensinya	62,84% 68 %	1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelayanan Pelatihan dan Non Pelatihan yang Dilaksanakan	1 Kegiatan
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase kefarmasian, perbekes dan makanan sesuai standar	86.48 %	1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Sarana produksi dan distribusi obat tradisional yang mendapatkan pembinaan sesuai dengan standar	35 sarana
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen
				Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
			1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
				Tercapaiannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen
				Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
			1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
				Tercapaiannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen
				Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	100%
			1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapaiannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen
			1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
				Tercapaiannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
				Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
			1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
				Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
			1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
				Prosentase Pemenuhan Pelayanan Jasa Umum Kantor	100%
				Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen
				Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
			1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
				Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
				Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Penyediaan Air Baku	19,5 liter/detik	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan jumlah air baku yang dikelola, mempertahankan kondisi sumber air baku dan acuan terhadap pengelolaan sumberdaya air	1 Tahun
			1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dipertahankannya kondisi dan kinerja jaringan irigasi kewenangan Pemda DIY	41 Daerah Irigasi

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Panjang jaringan distribusi SPAM regional Pengelolaan Air	110074,00 m	1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penambahan panjang pipa distribusi dan terkelolanya SPAM lintas kabupaten/kota	1150 liter/detik
	Curah pada SPAM Regional	1150 lt/dtk		Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional	1,15 liter/detik
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Penanganan Sampah Sistem Regional	780 ton/hari	1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1. Lahan pengembangan seluas 4,4057 Ha 2. Sarana dan prasarana Penunjang	780 ton/hari
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	27400 SR	1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Layanan sistem air limbah terpusat	1 kegiatan
				Pemantauan dan pengendalian kualitas air limbah domestik regional	1 Tahun
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Penanganan lokasi genangan	1 lokasi	1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Terkelolanya sistem drainase perkotaan DIY	1 Tahun
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	75,26%	1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penambahan, peningkatan dan mempertahankan kondisi jalan	75.26 %
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan Kinerja Tenaga Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi	99,14%	1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Pelatihan dan pembekalan teknis Tenaga Ahli konstruksi	100 Orang
	Peningkatan Kinerja Tenaga Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi	99.14 %		Penambahan jumlah tenaga ahli konstruksi bersertifikat dan terpenuhinya layanan pengujian laboratorium konstruksi	420 Orang
			1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Pelatihan dan pembekalan teknis Tenaga Ahli konstruksi	100 Orang

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
				Terkelolanya layanan dan tersedianya data informasi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Tahun
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Capaian Kinerja 98,99 % Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pengaturan dan Pembinaan		1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan 100 persen Ruang	
			1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	100 Persen
			1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Tercapainya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	20 persen
1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	46,11%	1.03.13.1.01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Tercapainya Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	46.11 persen
			1.03.13.1.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Penataan Lalu Lintas di Kawasan dikawasan Heritage City	100%
				Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1 Tahun
			1.03.13.1.03 Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	Tercapainya Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	70 persen
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	20%	1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya acuan dalam penentuan Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	53,78%	1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni	2500 unit

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni	2500 unit
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	48 titik	1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	permukiman yang terfasilitasi PSU	80 titik
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%
	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		Terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%
	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%			
			1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	100%
				Terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%
			1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
				Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%
			1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
			1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
				Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%
			1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
				Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%
			1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
				Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%
			1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi SKPD	100%
				Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas	100%
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani	75%	1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksanakannya Pencegahan Gangguan Trantibum melalui Deteksi Dini & Cegah Dini, Pembinaan & Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, & Pengawasan; Pemberdayaan Linmas dalam rangka Trantibum; Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa HAM; Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan; dan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarpras Trantibum	100%
			1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	100%
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA	Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	13 desa	1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana Provinsi	100%
			1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terterselenggaranya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%
			1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terterselenggaranya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah terlaksana dengan baik	100%
				Tercapainya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tercapainya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
				Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%
			1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
			1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah terlaksana dengan baik	100%
				Tercapainya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
				Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	100%
			1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%
				Tercapainya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
				Tercapainya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
			1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang terlaksana dengan baik	100%
				Tercapainya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
				Tercapainya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
				Terwujudnya adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%
			1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana prasarana dapat terpelihara dengan baik	100%
				Tercapainya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
				Tercapainya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
				Terwujudnya adminitrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		
1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitas, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Orang dengan HIV AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang Terpenuhi Kebutuhan	6.70 %	1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1. Pelayanan sosial bagi gelandangan, Pemulung dan pengemis Warga Binaan Balai 2. Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Distabilitas Mental Warga Binaan Balai	300 Orang

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Prosentase Anak Balita Terlantar, Anak yang Berhadapan Hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitas, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Orang Dengan HIV AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh bimbingan keterampilan, mandiri dan mampu berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat	6.7 %
			1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Tercapainya Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	100%
			1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.Pelayanan sosial bagi gelandangan, Pemulung dan pengemis Warga Binaan Balai 2. Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Distabilitas Mental Warga Binaan Balai	300 Orang
			1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial serta Keterampilan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (Wanita Yang berpotensi Menjadi Wanita Tuna Susila) di Balai PRSW terdiri dari klien reguler 60 orang, dan klien trauma center/ anak/ balita/ bayi 10 orang	70 orang
			1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Prosentase Anak Balita Terlantar, Anak yang Berhadapan Hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitas, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Orang Dengan HIV AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh bimbingan keterampilan, mandiri dan mampu berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat	6.7 %
			1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Tercapainya Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	100%
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			1.06.05.1.01 Penggantian Anak antar WNI dan Penggantian Anak oleh Orang Tua Tunggal		
			1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA			1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 kegiatan
			2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan daerah	1 kegiatan
				Terlaksananya administrasi keuangan daerah	1 tahun
				Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	1 kegiatan
			2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 kegiatan
				Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 kegiatan
				Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 tahun
			2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 tahun
			2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	1 kegiatan
				Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	1 tahun
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 kegiatan
			2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	1 kegiatan
			2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 kegiatan
				terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 kegiatan
				Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 kegiatan

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	1 tahun
				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 kegiatan
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	11040 orang	2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Terlaksananya penyusunan rencana tenaga kerja (RTK)	1 kegiatan
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	450 Orang	2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	550 orang
				Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	1 kegiatan
			2.07.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya akreditasi lembaga pelatihan kerja	85 lembaga
			2.07.03.1.03 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Terlaksananya kegiatan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	1 kegiatan
			2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi	1 kegiatan
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	11040 orang	2.07.04.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya kegiatan pelayanan antar kerja	12 bulan
			2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya pengelolaan informasi pasar kerja	12 bulan
			2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Terlaksananya pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	1 kegiatan
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1688 perusahaan	2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendataan dan informasi sarana Hubungan Industrial	400 PUK

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/erdampak pada kepentingan di 1 daerah Provinsi	1 tahun
			2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Terlaksananya Penetapan Upah Minimum	1 dokumen
2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAN	Jumlah Perusahaan besar dan menengah yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar	533 perusahaan	2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Terlaksananya kegiatan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja	1 kegiatan
				Terlaksananya penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan	1 kegiatan
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Pengambilan Keputusan di Ranah Publik	34,45%	2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Prosentase ARG pada APBD	27 persen
			2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan di legislatif	49 orang
			2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Perempuan dan Forum yang terfasilitasi	3 organisasi
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	85%	2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Regulasi terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak yang tersusun	0 dokumen
			2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan (termasuk TPPO) yang terselesaikan kasusnya oleh lembaga layanan yang ada di DIY	660 orang
			2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Gugus Tugas TPPO dalam 1 tahun	2 Forum

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio Kekerasan kasus dalam Keluarga	0,0013	2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	persentase kepemilikan legalitas kelahiran penduduk usia dibawah 5 tahun	98 persen
			2.08.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengguna/pengakses TeSAGA	500 orang
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perempuan Pengambilan Keputusan di Ranah Publik	34,45%	2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Tersajinya Data gender dan anak yang meliputi Variabel Jenis kelamin, kesehatan, pendidikan, Ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan pengambilan keputusan, hukum, sosial, perlindungan, pemenuhan hak anak dan Kelembagaan.	1 buku
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	85%	2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Regulasi terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak yang tersusun	1 dokumen
			2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah korban kekerasan terhadap anak yang terselesaikan kasusnya oleh lembaga layabab yang ada di DIY	352 orang
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0,08%	2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	1 tahun
			2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2100 kkal / kapita / hari
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Desa Rawan Pangan	0	2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	2 dokumen

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Penanganan Kerawanan Pangan	9 desa
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0,08%	2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Penjaminan Mutu Keamanan Pangan Segar	5 Kabupaten / Kota
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Layanan Administrasi Pertanahan Sesuai Peraturan Perundangan	100%	2.10.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Tercapainya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	100 persen
2.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Peningkatan fasilitasi penerbitan dokumen acuan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	0	2.10.11.1.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Tekelolanya Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	100%
	Persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan	100%		Tercapainya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten melalui pendaftaran bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	12619 bidang
				Tertindaknya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	100%
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertindaknya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
			2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertindaknya administrasi keuangan perangkat daerah	100%
				Tertindaknya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
			2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertindaknya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
			2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
			2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
			2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota (%)	100%	2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Terlaksananya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	5 Kabupaten / Kota
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Sumber Pencemar Air Sungai (Point Source) yang Ditangani di 10 Sungai	237 lokasi	2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,Udara, dan Laut	5 Kabupaten / Kota
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	175 ha	2.11.04.1.01 Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	5 Kabupaten / Kota
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat Ketaatan Usaha/ Kegiatan dengan Ijin Lingkungan dan/atau Rekomendasi Kelayakan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY	56,25%	2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	5 Kabupaten / Kota
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	3 Penghargaan	2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5 Kabupaten / Kota

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah di TPA Piyungan	780 ton/hari	2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Tertindakannya Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	3 Kabupaten / Kota
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	87,97%	2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Tertindakannya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi ; dan Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	100%
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	87,97%	2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Tertindakannya Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	100%
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	87,97%	2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Tertindakannya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di DIY	100%
			2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Tertindakannya pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di DIY	100%
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian) Persentase 100 Persen Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian) Persentase 87,97 % Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	100%	2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan	Tertindakannya Profil Kependudukan DIY	100%
				Tertindakannya Profil Kependudukan DIY	100 Persen

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1,17 anak	2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah bayi lahir hidup dalam 1 tahun	1600 bayi
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1,17 anak	2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Peserta MKJP	42 persen
			2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	54 persen
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0,0013 kasus	2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan BKS	65 desa
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
			2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%
				Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
			2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
				pemenuhan administrasi pelayanan administrasi perkantoran	100%
			2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan administrasi perkantoran	100%
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
			2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%
				Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%
			2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan administrasi perkantoran	100%
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
			2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	0,90 rasio	2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen acuan dalam perencanaan jaringan jalan di DIY	100%
			2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	penyediaan perlengkapan jalan dan dipertahankannya fungsi prasarana dan perlengkapan jalan yang telah tersedia	100%
			2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Masyarakat Pengguna Simpul Transportasi	100%
			2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas	100%
			2.15.02.1.06 Peretujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas	100%

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan audit standarisasi kendaraan dan pengemudi untuk angkutan umum dan angkutan barang	100%
			2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen operasional angkutan umum dalam trayek	100%
			2.15.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen acuan kinerja dan pengembangan trayek angkutan perkotaan	100%
2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian	70%	2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian	70%
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertindakannya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100%	100 persen
			2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertindakannya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 100%	100 persen
			2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertindakannya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 100%	100 persen
			2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertindakannya pengadaan peralatan dan mesin lainnya serta pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 100%	100 persen

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertindaknya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor 100%	100 persen
			2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertindaknya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 100%	100 persen
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	80%	2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Tertindaknya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Provinsi	100 persen
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Jaringan Infrastruktur dalam Lingkungan Pemda DIY yang Terintegrasi dalam Layanan TIK	90,50%	2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Tertindaknya Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100 persen
			2.16.03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Tertindaknya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provins	100 persen
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			2.17.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n	2066336 Juta Rupiah	2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerankab/kota dalam 1 daerah provinsi	1 tahun
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n	2066336 Juta Rupiah	2.17.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatnkoperasinya yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kab/kota dalam 1 daerahprovinsi	1 tahun
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n	2066336 Juta Rupiah	2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah peserta pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yg wilayah lintasdaerah oabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi	1 tahun
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n	2066336 Juta Rupiah	2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah,Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1 tahun
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	jumlah wirausaha baru	1295 wirausaha	2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha kecil yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dg para pemangku kepentingan	1 tahun

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Nilai Omset UKM Tahun n	96487 Ribu Rupiah	2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	1 tahun
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 tahun
			2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 tahun
			2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin Prinsip (Rp Juta)	1492353 Juta Rupiah	2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	ersusunnya Peta Potensi Investasi Provinsi	1 dokumen
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin Prinsip (Rp Juta)	1492353 Juta Rupiah	2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya promosi investasi dalam dan luar negeri	1 tahun
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	100%	2.18.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlayaninya permohonan perizinan, konsultasi/pendampingan dan pelayanan pengaduan	12 bulan

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai realisasi investasi PMA & PMDN	918963 Juta Rupiah	2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tertindakannya pemantauan, pengawasan dan pembinaan perusahaan DIY	1 tahun
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Waktu penyelesaian ijin usaha	1 hari	2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya standar pelayanan perizinan	1 dokumen
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA					
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan (kewirausahaan, pemuda pelopor, dll)	20%	2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan kewenangan provinsi	1750 pemuda
			2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan hibah	1 lembaga
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAHAAN	Jumlah medali dalam kompetensi POPWIL, POPNAS dan PEPARPENAS	0	2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah medali yang dicapai atlet DIY dalam kejuaraan tingkat nasional dan internasional	20 medali
			2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah lembaga/organisasi olahraga yang mendapat bantuan hibah	2 lembaga
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan (kewirausahaan, pemuda pelopor, dll)	20%	2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan hibah	1 lembaga
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					

Program			Kegiatan			
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	
2.20.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	2.20.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertindakannya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	
			2.20.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertindakannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	
			2.20.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertindakannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	
			2.20.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertindakannya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	
			2.20.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertindakannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	
			2.20.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertindakannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Analisis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Tertindakannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	8 dokumen
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kecepatan Informasi Sandi kepada pimpinan dan informasi persuratan di lingkungan Pemda DIY	100%	2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tertindakannya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	100 persen

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Tertindakannya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	100 persen
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertindakannya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen
			2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terticipainya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan, pelaksanaan akuntansi, pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan dan analisa prognosis realisasi anggaran	100 persen
			2.22.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terticipainya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 persen
			2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terticipainya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan, peralatan, perlengkapan kantor, barang cetakan, penggandaan dan bahan/material, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan arsip dinamis, dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	100 persen
			2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terticipainya penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan jasa pelayanan umum kantor	100 persen
			2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terticipainya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan, mesin lainnya dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100 persen
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase peningkatan Budaya tak benda	20%	2.22.08.1.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Tertindakannya pembinaan, pengembangan, pengelolaan, dan pelestarian, bahasa dan sastra	100 persen

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	yang dilestarikan			sertapermuseumman	
			2.22.08.1.02 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	Jumlah Arsip dan bahan pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservas	2000 lembar
			2.22.08.1.03 Penguatan Museum Sonobudoyo		
			2.22.08.1.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Terlaksananya tata kelola, pengembangan dan nominasi cagar budaya dan warisan budaya	100 persen
				Tersedianya dokumen penunjang revitalisasi bangunan cagar budaya dan warisan budaya di DIY	100%
				Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	100%
			2.22.08.1.05 Pengelolaan Taman Budaya		
			2.22.08.1.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	100%
				Terlaksananya pengadaan sarana da prasarana budaya	100 persen
			2.22.08.1.07 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Terlaksananya perencanaan, monitoring, evaluasi dan membangun kemitraan urusan kebudayaan	100 persen
			2.22.08.1.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Lumbung Mataraman	5 Kabupaten / Kota
				Terlaksananya Pelatihan, Sosialisasi, Fasilitasi HKI, Pameran, Pembangunan Workshop, Pembuatan Moulding, Produksi Gamelan, Pembuatan Profil dan Web Base, PembuatnDirektori, Standarisasi dan sertifikasi, serta mangayubagyo pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	11 Kegiatan
				Terselenggaranya pengembangan pelayanan kesehatan tradisional	100%
				Terwujudnya kearifan lokal dan potensi budaya	1 Tahun
			2.22.08.1.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Implementasi desa Global gotong royong tetrapeneur	4 desa

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
				Tertindakannya Gelar Seni Budaya Daerah	100%
				Tertindakannya kegiatan adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	1 kegiatan
				Tertindakannya Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	100 persen
				Tertindakannya pembinaan dan pengembangan desa budaya, lembaga penggiat seni, misi kebudayaan, penghargaan seniman, gelar budaya, publikasi, penghayat, nilai-nilai luhur, selendang sutra, event seni, lembaga pelestari budaya dan kelembagaan adat dan tradisi	100 persen
				Tertindakannya Pembinaan Jaga warga	100%
			2.22.08.1.10 Pendidikan Berbasis Budaya	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter	48.82 %
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Perpustakaan yang Terstandar	69 unit	2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	7 dokumen
			2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan administrasi keuangan	1 laporan
				jumlah laporan administrasi keuangan	14 laporan
			2.23.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah layanan administrasi barang milik daerah	1 jenis
			2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah arsiparis dan pustakawan yang dinilai angka kredit	15 orang
			2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum	5 layanan
				Jumlah jenis layanan administrasi umum	6 layanan
			2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang	4 paket
			2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jenis

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
				Jumlah jenis layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 layanan
			2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis barang milik daerah yang dipelihara	34 jenis
				Jumlah jenis Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara sesuai RKBMD	29 jenis
2.22.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan yang Terstandar	69 unit	2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	jumlah layanan perpustakaan	5 layanan
				jumlah perpustakaan yang di akreditasi	15 perpustakaan
			2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	jumlah sosialisasi budaya baca	10 kali
2.22.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Perpustakaan yang Terstandar	69 unit	2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	jumlah karya cetak dan karya rekam baru	2000 eksemplar
			2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	jumlah katalog induk daerah dan bibliografi daerah	5 terbitan
			2.23.03.1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	jumlah naskah kuno yang dilestarikan	10600 lembar
			2.23.03.1.04 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	jumlah lokasi penelusuran budaya timur	8 lokasi
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	8000 berkas	2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	jumlah OPD/UPTD yang terbina Kearsipannya	86 Instansi
			2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	jumlah arsip statis yang di alih media	500 foto
			2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	jumlah pengguna layanan arsip statis	500 orang

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
			3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
			3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah	100%
			3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
			3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
			3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
			3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	14%	3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 kawasan
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	7063 ton	3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terfasilitasinya rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	8 rekomendasi
			3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	jumlah dokumen kapal yang diterbitkan (STBLKK, SPB, Rekomendasi BBM bersubsidi, tambat labuh, dan SKA	2000 dokumen
			3.25.03.1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terfasilitasinya kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	2 kapal

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi Produksi Perikanan Budidaya	90% 89700 ton	3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terkelolanya kawasan perikanan budidaya serta terdistribusinya benih dan induk	5 kabupaten /kota
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikana	10%	3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terawasinya sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil	1 tahun
			3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terawasinya sumberdaya perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	1 tahun
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat konsumsi ikan masyarakat	26,05 kg/kapita/tahun	3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya rekomendasi izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	20 rekomendasi
			3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya pengawasan kualitas produk olahan dan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	1 tahun
			3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya pelaku usaha kelautan dan perikanan	100 kelompok
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat		

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			Daerah		
			3.26.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	LOS Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun n	2,45 LOS	3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah event yang terlaksana sebanyak 2 event dan penyusunan storytelling 1 kali	100%
			3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah pembangunan Sarana & Prasarana yang dibangun 1 lokasi dan penyusunan rencana induk & detil kawasan Pariwisata Daerah	100%
			3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah UJP yang diawasi dan dilatih meningkat pengetahuannya mengenai Standar Usaha Jasa Pariwisata setelah mengikuti Bimtek dan pengawasan sebanyak 16 UJP	100%
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	8377099 Orang	3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah jenis promosi yang dilakukan sebanyak 2 Jenis Promosi	100%
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	23,04%	3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf yang dilatih	1200 orang
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	1 OPD
			3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Keuangan	1 OPD
			3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Barang	1 OPD
				Penantausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 tahun
				Penantausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Tahun
				Terlaksananya penantausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 Tahun
			3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1 OPD
			3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Umum	1 OPD
			3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah	23 Jenis / Unit / Paket
			3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Administrasi Umum	1 OPD
				Pengadaan Barang Milik Daerah	1 OPD
			3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	6 Jenis
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah	24 Jenis
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah : Jasa KIR, Jasa STNK, Pemeliharaan kendaraan operasional, Pemeliharaan peralatan gedung, Rehab gedung, Pemeliharaan peralatan	7 jenis			
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Tanaman Pangan	2313500 ton	3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian pada Komoditas Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	3 sub sektor

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Bersertifikat yang Terdistribus	91%
			3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Penyediaan Bibit dan Penambahan Populasi Ternak	20027 ekor
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Tanaman Pangan	2313500 ton	3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian pada Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3 sub sektor
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Populasi Ternak	628870 870 Animal Unit	3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	5 Kabupaten / Kota
			3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah	5 Kabupaten / Kota
			3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	7800 Sampel
			3.27.04.1.05 Kesejahteraan Hewan	Penjaminan Mutu dan Kesejahteraan Hewan	1 unit usaha
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pertanaman Aman dari Serangan OPT Dan DPI	95%	3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3 sub sektor
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Tingkat pengetahuan dan ketrampilan SDM Pertanian	76%	3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	5 Kabupaten / Kota
			3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	5 Kabupaten

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			Penyuluhan Pertanian		/ Kota
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	86,66%	3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Terlaksananya Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	100%
				Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	5 Kabupaten / Kota
			3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	5 Kabupaten / Kota
				Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	100%
			3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Terlaksananya Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	5 Kabupaten / Kota
				Terlaksananya Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	100%
			3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/ tahun	5 Kabupaten / Kota
			3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih dan/ atau Bibit	5 Kabupaten / Kota
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase hutan konservasi terkelola	77,09%	3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Tersedianya pelayanan jasa lingkungan TAHURA dan hasil Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	12 bulan
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	2%	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Tersedianya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	5 Kabupaten / Kota
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer	<20 dusun	3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer (kurang dari)	20%
			3.29.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	0.75 Izin
3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar	4000 izin	3.29.03.1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Terkelolanya Pelaksanaan Perizinan Pertambangan	40 izin
3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Bangunan/ gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	9200 unit	3.29.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	1. Audit Energi	30 Gedung
3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan	7500 izin	3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan	75 Izin
			3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1. Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga; 2. Verifikasi Rumah Tangga Belum Berlistrik	4152 SR
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Nilai Ekspor Perdagangan Luar Negeri Tahun n	327,48 Ribu US\$	3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah SKA yang diterbitkan	17000 SKA

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	5,46%	3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	terkendalinya harga kebutuhan pokok	5%
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan Luar Negeri Tahun n	327,48 Ribu US\$	3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Peningkatan omset UKM yang mengikuti pameran	350 Ribu US\$
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	5,46%	3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Tertindaknya perlindungan konsumen selama satu tahun	1 Tahun
			3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	terawasinya barang beredar dan berbahaya	750 barang
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	2,5 milyar rupiah	3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan omset UKM yang mengikuti pameran	390 juta rupiah
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			3.31.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Nilai Produksi IKM	13773585 Juta Rupiah	3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	ATG Yang dimanfaatkan	30 ATG
				Meningkatnya Keterampilan IKM	8060 Orang
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Nilai Produksi IKM	13773585 Juta Rupiah	3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Meningkatnya pemahaman industri akan SIINAS	400 Orang
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	11040 orang	3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tertindakannya kegiatan penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 kegiatan
4.01 SEKRETARIAT DAERAH					
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan SKPD	1 tahun
	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%
	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%		Tertindakannya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
				Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%
				Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
				Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
				Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen
				Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen
				Tersusunnya dokumen perencanaan ,penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah	100%
				Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
			4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD	1 tahun
				Tercapaiannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
				Tertindakannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, serta Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%
				Tertindakannya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
				Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%
				Tertindakannya penatausahaan keuangan perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku	100%
				Tertindakannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%
				Tertindakannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100%
				Tertindakannya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100 persen

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
				Tertindakannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 persen
				Tertindakannya administrasi keuangan perangkat daerah	100%
				Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
			4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dukungan 100% terhadap persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Tahun
				Persentase penatausahaan barang milik daerah	100%
				Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
				Tertindakannya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%
				terlaksananya penatausahaan barang milik daerah	100%
				Tertindakannya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	100 persen
				Tertindakannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%
				Tertindakannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 persen
				Tertindakannya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%
				Tertindakannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
				Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%
			4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Umum	1 tahun
				Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
				Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
				Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
				Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
				Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
				Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	100 persen

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
				Tertindakannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%
				Tertindakannya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetak dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%
				Tertindakannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 persen
				Tertindakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
				Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
			4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah	1 tahun
				pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	100%
				Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%
				Tertindakannya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0%

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
				Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 tahun
				Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%
				Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%
				Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%
				Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya, terlaksananya pengadaan mebel	100 persen
				Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
			4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan SKPD	1 tahun
				persentase Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan	100%
				Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
				Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi	100 persen
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%
				Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen
				Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%
				Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 tahun
				Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	100%
				Tertindakannya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
				Tertindakannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%
				Tertindakannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%
				Tertindakannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%
				Tertindakannya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100 persen

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
				Tertindakannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%
				Tertindakannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 persen
				Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
			4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tertindakannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%
			4.01.01.1.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tertindakannya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah; Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah; dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	100%
			4.01.01.1.13 Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Peningkatan jumlah pengakses informasi pemda	309975 pengunjung
			4.01.01.1.14 Fasilitas Keprotokolan	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu dan Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan terhadap Pimpinan dan Tamu	85 skor
4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik	80%	4.01.02.1.02 Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Tertindakannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 persen
4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	100%	4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Tertindakannya Tugas Pemerintahan di DIY	100%

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tertindakannya Otonomi Daerah di DIY	100%
			4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerjasama Daerah	Tertindakannya Kerjasama antar pemerintah maupun dengan badan usaha/swasta di DIY	100%
4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rumusan Bahan Pengelolaan kebijakan penguatan sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	4 dokumen	4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Bahan Kebijakan Fasilitasi Bina Mental/Pelayanan Lembaga Keagamaan 1.4 dok/Layanan	
			4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Dokumen bahan kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	3 dokumen
				implementasi desa/kelurahan model segoro amarto	6 kelurahan
			4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Dokumen bahan kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	1 dokumen
				Koordinasi dan Sinkronisasi Terciptanya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya terkait Sumbu Filosofi DIY	1 dokumen
				Laporan hasil Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan sentra kewirausahaan di kalangan pemuda DIY	1 dokumen
				Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan SDM Kebudayaan	1 dokumen
				Pemberdayaan 4 lembaga kemasyarakatan terlaksana	100%
4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	100%	4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Tertindakannya fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan, fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan, pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya, dan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum kabupaten/Kota	100%
			4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Tertindakannya fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	100%
4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rumusan kebijakan rekayasa pertumbuhan perekonomian berkeadilan yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen	30%	4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Dokumen Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	7 dokumeh

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
	perencanaan				
			4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Dokumen Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	4 dokumen
			4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Dokumen Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	2 dokumen
4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Presentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan	100%	4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya penyedia jasa dengan penawaran terbaik yang memenuhi syarat	100%
			4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	tersedianya aplikasi penunjang layanan pengadaan secara elektronik	100%
			4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	peningkatan pemahaman terkait pengadaan barang/jasa dan persiapan peningkatan kelembagaan	100%
4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Presentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti	80%	4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Laporan Fasilitas KPBU	1 dokumen
	Presentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti	80 persen		Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1 dokumen
				Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	3 dokumen
			4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rumusan bahan kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah	4 dokumen
				Tersedianya dokumen pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	3 dokumen
4.01.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas	95%	4.01.10.1.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Meningkatnya kualitas kelembagaan Pemerintah Daerah DIY	100%

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
	Persentase kelembagaan Perangkat Daerah yang proporsional	100%		Meningkatnya kualitas kelembagaan Pemerintah Daerah DIY	100 persen
				Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan	100%
				Terlaksananya Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan	100%
			4.01.10.1.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan	Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	100 Persen
				Terwujudnya Peningkatan Budaya Pemerintahan	100%
				Terwujudnya Peningkatan Budaya Pemerintahan	100 Persen
			4.01.10.1.03 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	100 persen
			4.01.10.1.04 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	100 persen
			4.01.10.1.05 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	100 persen
			4.01.10.1.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se DIY	100 persen
			4.01.10.1.08 Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	100 persen
			4.01.10.1.09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	100 persen

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	100 persen
				Terlaksananya Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Aparatur	100 Persen
4.01.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas	95%	4.01.11.1.01 Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Terisinya Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	100%
	Terselesaikannya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tepat pada waktunya	100%		Terlaksananya Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	100%
				Terlaksananya Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	100%
				Terlaksananya Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	100%
4.02 SEKRETARIAT DPRD					
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100
			4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100%
			4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertindakannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
			4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertindakannya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya:	100%
			4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertindakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%
				Tertindakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%
			4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertindakannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%
			4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tertindakannya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	100%
			4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Tertindakannya Fasilitasi Fraksi DPRD dan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100%
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Agenda Program Kerja Program Kerja DPRD DIY	95%	4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Tertindakannya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan, dan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	100%

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Tertindakannya Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	100%
			4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tertindakannya Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	100%
			4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Tertindakannya Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Penyusunan Program Kerja DPRD	100%
			4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tertindakannya Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Pelaksanaan Reses	100%
			4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Tertindakannya Pengawasan Kode Etik DPRD	100%
			4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Tertindakannya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	100
				Tertindakannya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	100%
5.01 PERENCANAAN					
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertindakannya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan
			5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertindakannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan
			5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertindakannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 bulan
			5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertindakannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 bulan
			5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertindakannya Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan
			5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertindakannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan
			5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertindakannya pemeliharaan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan dan mesin lainnya, mebel, dan sarana prasarana gedung kantor lainnya	12 bulan
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perencanaan yang Tepat Waktu Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	100%	5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tertindakannya Subkegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Subkegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
				Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
			5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tertindakannya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi, Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	24 dokumen
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Pemerintahan	92,96 %	5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tertindakannya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20 dokumen
			5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tertindakannya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 dokumen
			5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tertindakannya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10 dokumen
5.02 KEUANGAN					
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertindakannya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
			5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penatausahaan Keuangan SKPD dan Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	100%

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
				Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun
				Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan
				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SIPKD	1 Tahun
				Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor	100%
				Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%
				Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%
				Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100%
				Terlaksananya Penyediaan Gaji dan unjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%
			5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah	100%
				Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	100%
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Tahun
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%
				Terlaksananya Penatausahaan BMD pada SPKD	100%

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	JILID	70 buah
				Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
				Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%
				Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang2an, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%
				Terlaksana penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, dan bahan logistik kantor	100%
			5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mebel	1 Jenis
				Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung	100%

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
				Kantor dan Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin, Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%
				Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100%
				Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%
				Terlaksananya pengadaan sarana dan prasaran gedung kantor atau bangunan lainnya, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	100%
			5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	listrik	12 bulan
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Surat Menyurat	100%
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa surat menyurat	100%
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertindakannya pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, penyediaan Jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%
				Tertindakannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%
				Tertindakannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mn Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%
				Tertindakannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinan	100%
				Terpeliharanya cctv	10 Unit
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD	100%	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA - SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD serta Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tertindakannya evaluasi APBD< APBD P dan Pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota	100%
			5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) serta Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	100%
			5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tertindakannya pembinaan akuntansi pemerintah provinsi	100%
			5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertindakannya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan,;Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; serta Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	100%
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertindakannya Penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan tang berlaku	12 bulan
	Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100%		Tertindakannya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi pendapatan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan PAD lain yang sah terhadap pendapatan	60.06 %	5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Data PAP	1 Dokumen

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
	Persentase kontribusi pendapatan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan	60.06 5		Tertindakannya pelayanan dan konsultasi pajak daerah serta pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	100%
	Persentase Kontribusi pendapatan pajak, Retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan	100%		Tertindakannya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100%
	Persentase Kontribusi pendapatan pajak, Retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan	60,06%		Tertindakannya pengelolaan pendapatan daerah	100%
				Tertindakannya perencanaan pengelolaan pajak daerah, analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah serta penyuluhan dan penyeberluasan kebijakan pajak daerah	100%
5.03 KEPEGAWAIAN					
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertindakannya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen
			5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertindakannya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, dan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	1 Tahun
			5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertindakannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 tahun

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertindakannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun
			5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertindakannya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun
			5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertindakannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun
			5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertindakannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pegawai sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzeting)	85%	5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Dukungan 100 % terhadap Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzeting) 83 %	100 Persen
			5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Tertindakannya pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100 Persen
			5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN		
			5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja	100%	5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Tertindakannya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Evaluasi	100 persen

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
PROVINSI	dan keuangan		Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah	
			5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 persen
			5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 persen
			5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 persen
			5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen
			5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 persen
			5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 persen
			5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel	100 persen
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	20%	5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	100 persen

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Tertindakannya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 persen
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan yang Terpilih untuk Mendukung Pembangunan Daerah	100%	5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tertindakannya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial dan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	2 dokumen
			5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tertindakannya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5 dokumen
5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN					
6.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	5.06.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertindakannya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah , Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
			5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertindakannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN , Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%
			5.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertindakannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%
			5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertindakannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
			5.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			5.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertindakannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa	100%

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
				Pelayanan Umum Kantor	
			5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%
5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG					
5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah	88 angka indeks	5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat, Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung, Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya dan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	100%
6.01 INSPEKTORAT DAERAH					
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah; koordinasi dan penyusunan DPA SKPD; dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%
			6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyiapan gaji dan tunjangan, koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi/keuangan SKPD	100%
			6.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD 100 %	
			6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi	100%
			6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD serta dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	100%

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya; pengadaan mebel; pengadaan sarana dan prasarana bangunan lainnya	100%
			6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat; penyediaan jasa komunikasi sumber daya ir dan listrik; penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%
			6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan; pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	90%	6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya pengawasan kinerja pemerintah daerah; pengawasan keuangan pemerintah daerah; reviu laporan kinerja, reviu laporan keuangan; pengawasan umum dan teknis kabupaten/kota; kerjasama pengawasan internal serta monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil pemeriksaan BPKRI dan tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP	100%
			6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah; pengawasan dengan tujuan tertentu	100%
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	90%	6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan	100%
			6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah; pendampingan asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi; koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi; pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan verifikasi penegakan integritas	100%
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanakannya Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen
			8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanakannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	100 persen

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
				Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
			8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksanakannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 persen
			8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen
			8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanakannya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 persen
			8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 persen
			8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanakannya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 persen
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Skor / Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2,92 angka	8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksanakannya Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 persen

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Skor /Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	3,36 angka	8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terumuskannya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dan 1 subkegiatan lainnya	100 persen
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Skor /Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	3,36 angka	8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksanakannya Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dan 2 sub kegiatan lainnya	100 persen
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi	2,9 angka	8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksanakannya Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan 2 sub kegiatan lainnya	100 persen
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor / Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2,92 angka	8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksanakannya Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, dan 1 subkegiatan lainnya	100 persen

BAB VI

PENUTUP

Mencermati hal-hal yang sudah tertuang dalam Rancangan APBD DIY Tahun Anggaran 2022 baik permasalahan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan, koreksi, dan pencermatan dari semua pihak akan banyak mewarnai pembahasan berikutnya. Hal-hal yang sudah direncanakan tentunya masih memerlukan beberapa pencermatan, dan semoga dari hasil pencermatan tersebut Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah segera dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, September 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X